



LAPORAN HAWASBID TRIWULAN II-2026

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



 admin@pa-yogyakarta.go.id

 www.reallygreatsite.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal.

Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;

19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 586/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2026 Pengadilan Agama Yogyakarta

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Selasa, 02 Juni 2026 sampai dengan tanggal Jum'at, 12 Juni 2026 bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Dra. Nurhudayah, S.H., M.H.**
Nip : 196212311992032017
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

2. Nama : **Dra. Rosalena, S.H.**
Nip : 196509171994032002
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

3. Nama : **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**
Nip : 197702242000122001
Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

4. Nama : **Drs. Rizal Pasi, M.H.**
Nip : 196204211989031004
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

5. Nama : **Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.**
Nip : 196804101993032002
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

6. Nama : **Abdurrahman, S.Ag.**
Nip : 197810042007041001
Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

BAB II
LAPORAN HAKIM PENGAWAS
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

1. Kondisi

Visi dan misi Mahkamah Agung/Pengadilan belum disosialisasikan kepada pegawai

Kriteria

1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No.578 tentang Petunjuk pelaksanaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya hal 11
2. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, halaman 7 sampai dengan halaman 34.
3. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, hal 3, 6 s.d hal 25.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Sebab

Sosialisasi visi dan misi belum terdokumentasikan

Akibat

Kegiatan sosialisasi belum tergambar dan dapat dipertanggungjawabkan

Rekomendasi

Agar dilakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi MA dan mendokumentasikannya (undangan, daftar hadir, Notulen dan foto/dokumentasi)

2. Kondisi

Ditemukan beberapa relaas panggilan melalui surat tercatat dikembalikan kepada pihak pengirim tanpa melalui prosedur penyampaian kepada Lurah/Kepala Desa

Kriteria

Sebelum surat tercatat retur harus dinyatakan keterangannya oleh Lurah/Kepala Desa Setempat (SEMA 1 Tahun 2023)

Sebab

Kurangnya pemahaman dari petugas pos tentang aturan penyampaian relaas panggilan dengan surat tercatat

Akibat

Relaas menjadi tidak sah sehingga menghambat persidangan dan merugikan pihak berperkara

Rekomendasi

Perlu dilakukan monitoring evaluasi kepada PT POS agar dapat bekerja secara lebih baik dan profesional sesuai dengan ketentuan

3. Kondisi

SK biaya informasi belum diumumkan di website dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

Kesalahan persepsi tentang SK tersebut

Akibat

pihak tidak bisa mendapatkan informasi secara utuh

Rekomendasi

Dibuatka SK dan diumumkan baik di website maupun di meja informasi

4. Kondisi

SK Ketua Pengadilan tentang biaya perolehan informasi di Pengadilan belum dipajang di meja layanan informasi

Kriteria

1. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

biaya salinan informasi masih hanya merujuk pada PP Nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak (PNBP) pada MA dan Badan peradilan di bawahnya

Akibat

masyarakat menjadi tidak jelas dalam usaha untuk mendapatkan informasi

Rekomendasi

dibuatkan SK ketua Pengadilan Agama yang berisi biaya informasi secara sederhana yang memuat tentang biaya penggandaan salinan informasi dan pengirimannya salinan dokumennya

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih ditemukan beberapa administrasi dan kegiatan sosialisasi belum terdokumentasi serta dilakukan terjadwal di Pengadilan Agama Yogyakarta. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Yogyakarta saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Yogyakarta terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Dr. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.
NIP. 198103152007041001

LEMBAR TINDAK LANJUT
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

DASAR HUKUM

Surat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 586/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/VI/2026 tanggal Selasa, 02 Juni 2026 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal Selasa, 02 Juni 2026 s/d Jum'at, 12 Juni 2026

OBJEK PEMERIKSAAN

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

TEMUAN - TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi

Visi dan misi Mahkamah Agung/Pengadilan belum disosialisasikan kepada pegawai

Kriteria

- 1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No.578 tentang Petunjuk pelaksanaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya hal 11
- 2. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, halaman 7 sampai dengan halaman 34.
- 3. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, hal 3, 6 s.d hal 25.
- 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Sebab

Sosialisasi visi dan misi belum terdokumentasikan

Akibat

Kegiatan sosialisasi belum tergambar dan dapat dipertanggungjawabkan

Rekomendasi

Agar dilakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi MA dan mendokumentasikannya (undangan, daftar hadir, Notulen dan foto/dokumentasi)

Tindak Lanjut

Sudah ditindaklanjuti dengan rapat sosialisasi visi dan misi Mahkamah Agung oleh Ketua pada hari Senin, 8 Juni 2026

B. ADMINISTRASI PERKARA**1. Kondisi**

Ditemukan beberapa relaas panggilan melalui surat tercatat dikembalikan kepada pihak pengirim tanpa melalui prosedur penyampaian kepada Lurah/Kepala Desa

Kriteria

Sebelum surat tercatat retur harus dinyatakan keterangannya oleh Lurah/Kepala Desa Setempat (SEMA 1 Tahun 2023)

Sebab

Kurangnya pemahaman dari petugas pos tentang aturan penyampaian relaas panggilan dengan surat tercatat

Akibat

Relaas menjadi tidak sah sehingga menghambat persidangan dan merugikan pihak berperkara

Rekomendasi

Perlu dilakukan monitoring evaluasi kepada PT POS agar dapat bekerja secara lebih baik dan profesional sesuai dengan ketentuan

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti dengan melakukan monev dengan Pos Indonesia Cabang Yogyakarta terkait permasalahan Surat Tercatat

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

NIHIL

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

NIHIL

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi

SK biaya informasi belum diumumkan di website dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

Kesalahan persepsi tentang SK tersebut

Akibat

pihak tidak bisa mendapatkan informasi secara utuh

Rekomendasi

Dibuatka SK dan diumumkan baik di website maupun di meja informasi

Tindak Lanjut

SK Biaya informasi telah diumumkan di website dan di meja pengaduan

2. Kondisi

SK Ketua Pengadilan tentang biaya perolehan informasi di Pengadilan belum dipajang di meja layanan informasi

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

biaya salinan informasi masih hanya merujuk pada PP Nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak (PNBP) pada MA dan Badan peradilan di bawahnya

Akibat

masyarakat menjadi tidak jelas dalam usaha untuk mendapatkan informasi

Rekomendasi

dibuatkan SK ketua Pengadilan Agama yang berisi biaya informasi secara sederhana yang memuat tentang biaya penggandaan salinan informasi dan pengirimannya salinan dokumennya

Tindak Lanjut

SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi telah dibuat

TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Yogyakarta, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Drs. Tubagus Masrur, S.H.

Nip. 19680906.199403.1.003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

SURAT TUGAS

Nomor : 587/KPA.W12-A1/ST.PW1.1.1/VI/2026

- Menimbang : 1. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 586/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/VI/2026 tentang Penunjukan Perubahan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2026, perlu menerbitkan surat tugas pemeriksaan reguler;
2. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler.

MEMBERI TUGAS

Kepada :

No	Nama / NIP	Jabatan	Tugas
1.	Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. NIP. 196212311992032017	Hakim	Manajemen Peradilan
2.	Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. NIP. 197702242000122001	Hakim	Administrasi Perkara
3.	Dra. Rosalena, S.H. NIP. 196509171994032002	Hakim	
4.	Drs. H. Rizal Pasi, M.H. NIP. 196204211989031004	Hakim	Administrasi Persidangan
5.	Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. NIP. 196804101993032002	Hakim	Administrasi Kesekretariatan
6.	Abdurrahman, S.Ag. NIP. 197810042007041001	Hakim	Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

- Untuk : 1. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang yang telah ditetapkan.
2. Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Kesekretariatan, Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik.
3. Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 10 (sepuluh) hari kalender, dimulai hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Juni 2026.
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler.



Yogyakarta, 2 Juni 2026

Ketua

Tubagus Masrur



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono No.53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

NOTULA

Dasar : Surat Undangan No. 605/KPA.W12-A1/UND.OT1.6/VI/2026
Hari : Senin, 8 Juni 2026
Pukul : 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Media Center Bawah
Acara : Sosialisasi Visi dan Misi Mahkamah Agung
Peserta Rapat: Seluruh aparat PA Yogyakarta

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta, Bapak Taslim, S.H. dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya Sosialisasi dari Bapak Ketua terkait penjabaran Visi dan Misi Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas pokok.

Sosialisasi Visi dan Misi Mahkamah Agung:

Ketua menekankan bahwa sebagai bagian dari penegak hukum di bawah Mahkamah Agung RI, seluruh aparat PA Yogyakarta wajib menginternalisasi Visi dan Misi MA bukan sekadar sebagai tulisan yang dipigura, melainkan sebagai ruh dalam pelayanan publik dan penyusunan target kinerja

Komitmen Terhadap Visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Ketua PA Yogyakarta menjabarkan bahwa peradilan yang "Agung" di tingkat instansi daerah harus diwujudkan melalui 3 pilar utama:

- **Kemandirian & Integritas Tinggi:** Menjaga integritas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui Penguatan **Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)** serta **Zona Integritas (ZI)** harus terinternalisasi bukan sekadar pemenuhan dokumen (eviden).
- **Pelayanan Hukum Prima:** Responsif terhadap kebutuhan masyarakat Yogyakarta dengan mengedepankan transparansi informasi biaya, alur perkara, dan kepastian hukum.
- **Modernisasi Peradilan:** Pengoptimalan digitalisasi (*E-Court*, *E-Litigasi*, dan pemanfaatan SIPP) demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menutup pembinaan dengan mengingatkan bahwa marwah Mahkamah Agung berada di tangan para aparat yang bertugas di garda terdepan pelayanan.

Notulis

Nur Asiyah



Mengetahui
Ketua

Tubagus Masrur

**DOKUMENTASI RAPAT
SOSIALISASI VISI DAN MISI MAHKAMAH AGUNG
SENIN, 8 JUNI 2026
PUKUL : 13.30 WIB S.D. SELESAI**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : 605/KPA.W12-A1/UND.OT1.6/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yogyakarta 08 Juni 2026

Yth. Para Pejabat dan Pegawai pada daftar terlampir
di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam acara Sosialisasi Visi Misi
Pengadilan Agama Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 08 Juni 2026
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Media Center Bawah Pengadilan Agama Yogyakarta

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Tubagus Masrur



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

LAMPIRAN

Surat Undangan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor 605/KPA.W12-A1/UND.OT1.6/VI/2026
Tanggal :08 Juni 2026

**DAFTAR PEJABAT DAN PEGAWAI YANG DIUNDANG
DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DIUNDANG**

1. Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Panitera Muda
5. Kepala Sub Bagian
6. Panitera Pengganti
7. Jurusita/Jurusita Pengganti
8. Pejabat Fungsional Tertentu
9. Pelaksana
10. PPNPN

Ketua

Tubagus Masrur



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Sosialisasi
Nama Kegiatan : Sosialisasi Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta
Hari, Tanggal : Senin, 08 Juni 2026
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Media Center Bawah Pengadilan Agama Yogyakarta

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. TUBAGUS MASRUR, S.H.	Ketua	
2.	Dr. MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.Hum.	Wakil Ketua	
3.	Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H., M.H.	Hakim	
4.	Dra. UFIK NUR ARIFAH HIDAYATI, M.S.I.	Hakim	
5.	Drs. H. RIZAL PASI, M.H.	Hakim	
6.	Dra. ROSALENA S.H.	Hakim	
7.	SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H., M.H.	Hakim	
8.	ABDURRAHMAN S.Ag	Hakim	
9.	Drs. ABDUL ADHIM AT	Panitera	
10.	TASLIM, S.H.	Sekretaris	
11.	Dra. MARDHIYAH NUR	Panmud Gugatan	
12.	Dra. LILIK MAHSUN, S.H., M.H.	Panmud Permohonan	
13.	ENDANG WINARNI, S.H., M.H.	Panmud Hukum	
14.	VERAWATI WIDJAYA, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian & Ortala	
15.	NUR ASIYAH S.E., M.M.	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	
16.	MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.	Kasubag Umum & Keu	
17.	Dra. Hj. AZIZAH TRININGSIH, S.H.	Panitera Pengganti	
18.	SUCIATI, S.Ag.	Panitera Pengganti	
19.	NANIK NAJEMI'AH, S.H.	Panitera Pengganti	
20.	RAHMAH SUFIYAH, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	

21.	MUHAMMAD SAYHON, S.H.	Panitera Pengganti	Cap.
22.	PIRDAUS, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	
23.	Hj. YANI PURWANI, SH	Panitera Pengganti	CT
24.	ASPIYAH, S.H.	Panitera Pengganti	
25.	HANIF HIDAYATI, S.Ag.	Panitera Pengganti	
26.	FINA NURIANA, S.H.I.	Panitera Pengganti	
27.	NUR HAYATI, S.H.	Panitera Pengganti	
28.	YULI ASTANTO W. H., S.E., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
29.	TASLIMAN	Jurusita	
30.	Hj. RINI MARFUAH, S.Pd.	Jurusita	
31.	WURI MEGA SARI, S.H.	Jurusita	
32.	BUNGA HARI, S.Ag.	Jurusita	
33.	WALUYO	Jurusita Pengganti	
34.	NOVIALITA PITALOKA, S.T.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	
35.	ARINA RAHMANIAR, S.Kom.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	
36.	IDA NOOR RAHMA, S.T.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	
37.	DYBI ADITYA SAPUTRA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	
38.	CATUR GUNAWAN, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	
39.	HENNY WIDIASTUTI, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	
40.	NURJANNA WASAHUA, S.Kom., M.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	
41.	ZAKY FAZRURAHMAN ISKANDAR, S.H.	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	
42.	MEGANANDA HERSAYEKTI CECRIANA, S.H.	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	PTSP
43.	MUHAMMAD YAHYA SUQRI, S.H.	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	
44.	BYOLANDA FIORENTINA, A.Md.A.B.	Klerik - Pengelola Penanganan Perkara	
45.	IZZA MEUTIA AZIZA, S.H.	CPNS / Analisis Perkara Peradilan	
46.	SINDUKA BAYU PAMUNGKAS, A.Md.Pas.	CPNS / Dokumentalis Hukum	
47.	BELLA DONA RIVDIANITA, A.Md.	CPNS / Dokumentalis Hukum	
48.	MIFTAH FAUZI, S.H.	Penata Layanan Operasional	
49.	RIZAL PANATAGAMA ISKANDAR, S.H.	Penata Layanan Operasional	
50.	ATHAR SUBARKAH, S.H.	Penata Layanan Operasional	
51.	WIRA WALYANTIKO, S.H.	Penata Layanan Operasional	
52.	ABDUL MUIZ, S.H.	Penata Layanan Operasional	

53.	ATNAN SETIABUDI	Operator Layanan Operasional	
54.	ANDRIYANTO PAMUNGKAS	Operator Layanan Operasional	
55.	MARSUDI	Operator Layanan Operasional	
56.	MUKLAS ABROR	Operator Layanan Operasional	
57.	SARIYANTO	Pengadministrasi Perkantoran	
58.	RIZKY RAMADHANI	PPNPN	

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Ketua


Tubagus Masrur

TINDAKLANJUT PANGGILAN SURAT TERCATAT

Telah dilakukan Monev dengan PT Pos Indonesia Cabang Yogyakarta terkait pelaksanaan Surat Tercatat pada Hari Kamis, 11 Juni 2026



Monitoring dan Evaluasi Pemanggilan Via Surat Tercatat dengan PT. POS Indonesia Cabang Kota Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta dengan PT. POS Indonesia Cabang Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanggilan para pihak melalui layanan surat tercatat. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau efektivitas pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan serta memastikan proses pemanggilan pihak berperkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai aspek pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat, mulai dari ketepatan waktu pengiriman, akurasi penyampaian surat kepada para pihak, hingga kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.



The left photograph shows a service counter at the Pengadilan Agama Yogyakarta. A sign above the counter reads "INFORMASI / PENGADUAN PPID". A tablet on the counter displays the PPID system interface. The right photograph is a close-up of the tablet screen, showing a fee schedule titled "RINCIAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026".

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Pengadaan Teknologi Informasi Rp. ...		Tidak termasuk biaya perolehan informasi
2	Informasi Elektronik Rp. 0,-		Tidak termasuk biaya perolehan informasi

Demikian informasi dan biaya yang harus dibayar, harap dimengerti.

Diumumkan di meja informasi

BIAYA UNTUK MEMPEROLEH SALINAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Biaya/Tarif Layanan PPID:

Pelayanan informasi publik di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tidak dipungut biaya. Namun untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Catatan: Untuk biaya PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, diatur Pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. ([Download Disini](#))



Penetapan Standar Tarif Biaya Pelayanan Permohonan Informasi

SK KMA No: [2-144/KMA/SK/VIII/2022](#)

SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta : [Download disini](#)

Masukkan kata kunci



Jam Layanan

HARI	JAM KERJA	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	07.30 - 16.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	07.30 - 16.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB

SPBE PA Yogyakarta



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Scan ini atau
Klik disini untuk masuk
<https://spbe.pa-yogyakarta.go.id/>

Elektronik Akta CeraI



ELEKTRONIK AKTA CERAI

Scan ini atau
Klik disini untuk masuk
<https://eac.mahkamahagung.go.id/>

Antrian Sidang Online



ANTRIAN SIDANG ONLINE

SIGAP (Sidang Giampang Diparalel)

Scan ini atau
Klik disini untuk masuk
<https://sigap.pa-yogyakarta.go.id/>

Kegiatan

pa-yogyakarta.go.id/storage/files/shares/Kepaniteraan/SK-Biaya-Informasi.pdf

SK-Biaya-Informasi.pdf



1



2



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 638/KPA.W12-A1/SK.HK2.6/VI/2026

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
 - Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud serta menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Yogyakarta



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 638/KPA.W12-A1/SK.HK2.6/VI/2026

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud serta menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026;
- Kesatu : Menetapkan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh pemohon tahun 2026 sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan kepada Petugas Informasi untuk menyiapkan formulir informasi beserta informasi yang diminta sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Juni 2026

KETUA

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA
TUBAGUS MASRUR

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 638/KPA.W12-A1/SK.HK2.6/VI/2026
Tanggal : 11 Juni 2026

**RINCIAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya penggandaan/ fotocopy informasi	Rp. *,-	*)Biaya sesuai dengan jumlah penggandaan dan transportasi
2.	Informasi elektronik	Rp. 0,-	Diberikan secara cuma-cuma (gratis). Pemohon hanya perlu menyedia kan <i>flashdisk</i> atau media penyimpanan sendiri, atau dikirimkan melalui email

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas 1A

TUBAGUS MASRUR